

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BANDUNG**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing di Dinas Ketenagakerjaan kota Bandung. Retribusi perpanjangan IMTA yaitu pungutan atas pemberian perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga asing yang bertujuan untuk memberikan peluang penambahan pendapatan asli daerah (PAD). Jenis Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif dan Teknik pengumpulan datanya yaitu berdasarkan observasi, dokumentasi, wawancara langsung dan kepustakaan. Peraturan IMTA yang digunakan yaitu berdasarkan PERPRES No.20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA dan PP No. 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan TKA dan retribusi DKPTKA di Dinas Ketenagakerjaan kota Bandung pada tahun 2020 sudah terimplementasi secara prosedural dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya pemberhentian sementara untuk penggunaan TKA diperusahaan kota Bandung akibat Covid-19 dan pada bulan Oktober sampai Desember 2021 retribusi DKPTKA tidak dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung melainkan di Dinas Penanaman Modal Daerah Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bandung karena adanya perusahaan di Kota Bandung yang tidak melakukan pelaporan tentang Tenaga Kerja Asing serta memproses izin perpanjangan IMTA.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan TKA, Retribusi IMTA

***IMPLEMENTATION OF THE RETRIBUTION POLICY FOR THE
EXTENSION OF THE PERMIT TO EMPLOY FOREIGN WORKERS AT THE
MANPOWER OFFICE OF BANDUNG CITY.***

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the retribution policy for the extension of the permit to employ foreign workers at the Bandung City Manpower Office. The IMTA extension levy is a levy for granting an extension of the license to hire foreign workers to employers of foreign workers, which aims to provide opportunities for additional regional original income (PAD). This type of research uses a qualitative descriptive method with a comparative descriptive approach, and the data collection technique is based on observation, documentation, direct interviews, and literature. The IMTA regulation used is based on PERPRES No. 20 of 2018 concerning the use of TKA and PP No. 34 of 2021 concerning the use of foreign workers. The results showed that the use of foreign workers and the DKPTKA levy at the Bandung City Manpower Service in 2020 had been implemented procedurally compared to 2021. This was due to the temporary suspension of the use of foreign workers in Bandung city companies due to Covid-19. From October to December 2021, the DKPTKA levy was not carried out at the Bandung City Manpower Service but the Bandung City One-Stop Regional Investment Office (DPM-PTSP) because companies in the city of Bandung that do not report on foreign workers and process the IMTA extension permit.

Keywords: *Implementation, Foreign Workers Regulations, IMTA Retribution*